

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BOS-BOPDA UNTUK
MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN
DI SMP KHADIJAH A. YANI SURABAYA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I)
Konsentrasi Pendidikan Agama Islam



Oleh:
M. GHOFAR
NIM: F.0.5.4.09.218

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : M. Ghofar

NIM : F.0.5.4.09.215

Program : Magister (S-2)

Institusi : Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juli 2013

Saya yang menyatakan,

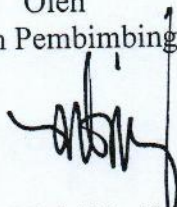


M. Ghofar

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis M. M.Ghofar ini telah disetujui
pada tanggal 14 Juli 2013

Oleh
Dosen Pembimbing,



DR. H. Achmad Muhibin Zuhri, M. Ag.
NIP . 197207111996031001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

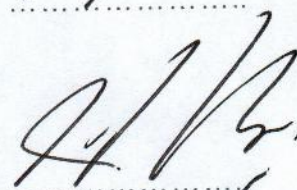
Tesis M. Ghofar ini telah diuji
Pada tanggal 5 September 2013

Tim Penguji:

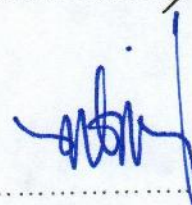
1. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, M.A. (Ketua/ Penguji)



2. Dr. H. M. Yunus Abu Bakar, M.Ag (Penguji Umum)



3. Dr. H. Achmad Muhibin Zuhri, M.Ag. (Pembimbing/ Penguji)



Surabaya, 5 September 2013

Direktur,



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

NIP. 195008171981031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Ghofar
NIM : F05409218
Fakultas/Jurusan : Magister Pendidikan Agama Islam
E-mail address : ghofar17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BOS-BOPDA UNTUK MENINGKATKAN
AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP KHADIJAH A. YANI SURABAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(M. Ghofar)

Pasal ini menunjukkan suatu kesadaran untuk memajukan pendidikan nasional sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara lain yang menyediakan anggaran dalam jumlah yang besar untuk pembangunan pendidikannya, dan sekaligus menunjukkan bahwa salah satu faktor yang penting dalam pembangunan pendidikan adalah tersedianya dana yang besar dan memadai. Tentu ketersediaan dana yang besar dan memadai tersebut harus disertai dengan pengelolaan yang benar dan tepat kepada sasaran. Karena jika tidak akan menimbulkan pemborosan, inefisiensi dan kurang mengarah kepada sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan hal itu maka Persoalan pengelolaan dana pendidikan tentu tidak kalah pentingnya dengan persoalan pengadaan dana pendidikan.

Masalah dasar pembangunan pendidikan dapat dibagi menjadi dua yaitu (1) Masalah Peningkatan Akses Pendidikan dan (2) Masalah Kualitas Layanan Pendidikan. Pada masalah yang pertama yaitu peningkatan akses pendidikan, yang lebih sangat dirasakan oleh negara-negara sedang berkembang dan negara-negara yang belum berkembang adalah bagaimana seluruh warga masyarakat usia sekolah khususnya pada usia pendidikan dasar dapat dengan mudah memperoleh pendidikan, tentu juga dengan memperhatikan mutu pendidikan. Upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bukan berarti mengabaikan mutu pendidikan, artinya kedua hal tersebut diupayakan berjalan beriringan, sehingga masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu memperoleh kesempatan yang sama dengan masyarakat mampu untuk menikmati pendidikan yang bermutu.

sistem, maka delapan standar tersebut merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Standar Kompetensi Lulusan sangat terkait erat dengan Penilaian dan Proses Pembelajaran yang berlangsung, sedangkan Penilaian juga terkait dengan Pendidik, Sarana Prasarana dan Isi Pembelajaran. Proses Pembelajaran dan Penilaian yang bermutu tentu sangat bergantung dari kualitas pendidik dan dengan dukungan sarana prasarana yang baik pula. Demikian pula halnya dengan sarana prasarana, kesejahteraan pendidik sangat bergantung pada ketersediaan pembiayaan, yang tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik dan tepat.

Ketersediaan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat digunakan untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa keluarga tidak mampu, malahan sekolah dapat membebaskan biaya pendidikan bagi mereka. Selama ini angka partisipasi kasar (APK) yang masih rendah faktor penyebab utamanya adalah banyak siswa putus sekolah dari golongan keluarga tidak mampu atau keluarga miskin, dengan alasan kesulitan biaya. Dengan adanya BOPDA dan BOS dapat diarahkan subsidi silang biaya penyelenggaraan pendidikan, artinya siswa dari golongan keluarga tidak mampu atau miskin dapat dibebaskan dari biaya pendidikan dan bila perlu biaya personal seperti biaya buku, seragam sekolah, transportasi ditanggung oleh ketersediaan dana-dana tersebut. Sehingga tidak ada lagi alasan putus sekolah karena faktor kesulitan biaya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Setiap warga Negara yang berusia 7 – 15 tahun

wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

Selanjutnya secara Yuridis pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan ke-mampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab .

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan pembiayaan yang cukup sehingga seluruh kegiatan lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program-program dan kebutuhannya. Pendanaan yang diperlukan oleh sekolah khususnya sekolah swasta tidak cukup mengharapkan sumber dari partisipasi orang tua ataupun masyarakat, tetapi juga memerlukan dukungan sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan diteruskannya berbagai kewenangan yang semula menjadi urusan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pemba-ngunan termasuk juga dalam pembangunan aspek pendidikan. Demikian pula halnya dengan pembiayaan pendidikan yang semula hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, sekarang dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagian urusan pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa faktor pembiayaan dan pengelolaan merupakan faktor penting untuk meningkatkan akses pendidikan dan mutu pendidikan. Bantuan Operasional daerah (BOPDA) yang sumbernya dari Pemerintah Kota Surabaya yang dihibahkan kepada sekolah-sekolah swasta sebagai dana hibah dan diberikan kepada sekolah negeri sebagai dana operasional dari tingkat SD sampai SMP untuk seluruh siswa, dan untuk SMA dikhususkan untuk siswa tidak mampu yang dimulai sejak 1 Januari 2009 bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dan mutu pendidikan di kota Surabaya. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik dan tepat agar tujuannya dapat tercapai. BOPDA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah khususnya di sekolah swasta, selain sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti dana pembangunan, iuran bulanan. Hibah ini memperkuat ketersediaan biaya penyelenggaraan pendidikan dan merupakan upaya untuk mewujudkan pasal 31

garariskan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tersebut dikatakan Azas-Azas umum Pengelolaan Keuangan Negara sebagai berikut : (1) Azas akuntabilitas berorientasi pada hasil, (2) azas profesionalitas, (3) azas proporsionalitas, (4) azas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan (5) azas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Dengan dianutnya azas-azas umum tersebut, maka Pengelolaan BOS dan BOPDA oleh sekolah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Negara harus mengacu kepada azas-azas umum tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka pengelolaan BOS dan BOPDA di sekolah-sekolah tidak hanya dapat dipandang sebagai upaya memperbesar ketersediaan biaya penyelenggaraan pendidikan untuk memperluas akses dan mutu pendidikan, tetapi juga harus dipandang sebagai pengelolaan keuangan Negara. Jadi pengelolaan BOPDA oleh sekolah-sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta merupakan pengelolaan keuangan Negara yang diarahkan untuk memperbesar ketersediaan biaya penyelenggaraan pendidikan dalam rangka meningkatkan akses pendidikan khususnya program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Tentu hal ini menuntut pengetahuan yang mendalam dan keahlian dalam mengelolanya. Peranan kepala sekolah selaku manajer sangat berpengaruh terhadap pengelolaan BOPDA dan BOS, seberapa jauh pengetahuan

dan keahlian kepala sekolah memahami keuangan negara dan kebutuhan-kebutuhan sekolah dalam upaya memenuhi peningkatan akses dan mutu pendidikan sekolahnya akan menjadi faktor yang penting untuk keberhasilan pengelolaan BOS-BOPDA tersebut.

Sekolah-sekolah swasta khususnya tingkat Menengah Pertama di Surabaya sebagai penerima BOS dan BOPDA memberi andil lebih besar dibandingkan dengan Sekolah-sekolah Negeri dalam hal APK. APK Sekolah-sekolah Swasta mencapai 70%, sedangkan Sekolah-sekolah Negeri 30%. Tetapi dalam hal mutu yang terindikasikan dalam hasil akreditasi sekolah-sekolah swasta masih rata-rata di bawah sekolah negeri, demikian pula rata-rata hasil ujian nasional sekolah-sekolah swasta masih berada di bawah sekolah-sekolah negeri.

SMP Khadijah Surabaya yang bernaung di bawah Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU Khadijah adalah sekolah yang juga menerima BOS-BOPDA sebagaimana sekolah-sekolah swasta lainnya. SMP Khadijah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dengan sungguh-sungguh ikut berpartisipasi untuk memperluas akses pendidikan khususnya pada pendidikan dasar, hal ini terbukti bahwa banyak masyarakat yang kurang mampu tercatat sebagai siswa di SMP Khadijah. Pemberian atau hibah dana BOS-BOPDA dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Surabaya kepada sekolah-sekolah swasta salah satu sasarannya adalah meningkatkan akses pendidikan khususnya ditujukan kepada golongan masyarakat tidak mampu, agar mereka setidaknya

dapat memperoleh pendidikan 9 tahun sesuai dengan Program Wajib Belajar 9 tahun, tanpa terhambat persoalan biaya pendidikan. Sampai saat ini masih cukup banyak golongan masyarakat tidak mampu, tidak dapat mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun, akibat ketiadaan biaya. Dengan adanya BOS-BOPDA, persoalan tersebut dapat diatasi, terbukti bahwa banyak siswa di SMP Khadijah yang terbantu biaya belajarnya mulai dari pembebasan syahriyah, buku sampai pembebasan sepenuhnya, hal ini tercermin dalam Rencana Strategis Pengembangan Pendidikan Yayasan Khadijah yaitu pada Visi, misi dan tujuan pendidikannya. Dengan adanya BOS-BOPDA maka banyak kegiatan yang dapat di biayai sesuai dengan pedoman penggunaan dana BOS dan peraturan Wali Kota untuk pengelolaan dana BOPDA diantaranya Biaya Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum, pembinaan siswa, dan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka setiap upaya untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan di sekolah-sekolah swasta sangat berarti bagi usaha peningkatan mutu dan akses pendidikan di kota Surabaya. Pemberian BOS dan BOPDA kepada sekolah-sekolah swasta khususnya SMP Khadijah Surabaya tentu diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akses pendidikan. Inilah yang menjadi salah satu alasan penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana implementasi pengelolaan BOS-BOPDA di SMP Khadijah Surabaya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tesis tentang “Implementasi pengelolaan

yaitu ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Setiap negara di dunia mempunyai kewajiban kepada setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan menikmati pendidikan dasar. Negara menyediakan sistem pendidikan dasar yang dapat menyerap seluruh anak pada usianya.

Indikator Akses Pendidikan Adalah Jumlah siswa usia sekolah yang dapat ditampung di suatu sekolah, yaitu dengan menghitung jumlah siswa yang dapat ditampung di suatu sekolah berdasarkan kepada tersedianya ruang kelas belajar, di mana tiap-tiap ruang kelas belajar dalam kondisi layak untuk dipergunakan sebagai ruang belajar siswa. Selain indikator di atas, dapat juga menggunakan indikator keterjangkauan pembiayaan sekolah oleh orang tua dari golongan ekonomi tidak mampu dengan ditandai adanya keringanan atau-pun pembebasan SPP dan adanya subsidi silang dalam pembiayaan. Ketersediaan sarana-prasarana belajar dan keterjangkauan pembiayaan oleh masyarakat dalam membiayai pendidikan anak mereka merupakan dua faktor penting yang mempengaruhi akses pendidikan. Walaupun ada sarana-prasarana belajar yang cukup tetapi bila beban biaya pendidikan tidak dapat dipikul oleh orang tua, tentu anak mereka tidak dapat memperoleh kesempatan atau tidak mampu mengakses pendidikan, lebih-lebih pendidikan yang bermutu yang umumnya memerlukan biaya yang besar. Menurut Suryadi dan Tilaar (1993 : 94) : Sejak awal tahun 1970-an , pemerintah mulai merintis program perluasan kesempatan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat, pada semua jenjang dan jenis pendidikan khususnya kesempatan memperoleh pendidikan dasar.

Program penting yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan ini adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang telah dinyatakan tuntas pada tahun 2008. Walaupun sudah dinyatakan tuntas, namun pada kenyataannya ada 76 kabupaten yang APK-nya masih di bawah 80% (Kementerian Pendidikan Nasional 2010). Berdasarkan kenyataan ini, maka persoalan akses pendidikan masih merupakan persoalan yang harus terus mendapat perhatian dan pemecahannya. Menurut Suryadi dan Tilaar (1993 : 95) : mereka yang belum memiliki kesempatan bersekolah karena beberapa faktor, di antaranya karena secara ekonomis kurang mampu, tinggal di daerah terpencil, anak-anak yang cacat fisik, dan penduduk yang berpindah-pindah.

Permasalahan di tingkat implementasi ditandai oleh masalah internal masyarakat. Pada tingkat ini masih perlu strategi yang membuat masyarakat sadar dan paham bahwa pendidikan murah, mudah dan berkualitas adalah hak yang harus diambil dan kewajiban pemerintah atau sekolah untuk menyediakannya. Saat ini masyarakat masih menganggap wajar apabila menghendaki layanan pendidikan yang berkualitas identik dengan mengeluarkan biaya layanan yang lebih tinggi. Upaya merubah “mind set” seperti itu perlu terus dilakukan. Tentu saja pihak sekolah perlu pula menyediakan mekanisme komplain agar kesadaran masyarakat akan haknya dapat diakomodir jika tidak dipenuhi oleh pihak sekolah. beberapa daerah lain masyarakat malah menuntut diterbitkan kontrak pelayanan pendidikan (citizen charter) dengan sekolah dimana siswa belajar tanpa ada tambahan biaya. Pada tataran masyarakat inilah strategi advokasi diperlukan agar

Dalam prespektif pendidikan dapat dilihat dari sisi prestasi siswa, proses pembelajaran, kemampuan lulusan dalam mengembangkan potensinya di masyarakat, serta dalam hal memecahkan masalah dan berfikir kritis.

Dengan demikian, untuk mengetahui pendidikan yang bermutu, perlu dikaji mutu dari segi proses. Dari segi proses, mutu pendidikan berarti keefektifitasan dan efisiensi seluruh factor yang berperan dalam proses pendidikan. Faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kualitas guru
2. Sarana dan Prasarana
3. Suasana Belajar
4. Kurikulum yang dilaksanakan
5. Pengelolaan sekolah

Mutu Pendidikan secara multidimensi meliputi aspek mutu input, proses, dan output. Oleh karenanya, pengembangan pencapaian mutu harus secara holistik dimulai dari input, proses dan output. Dengan demikian, mutu pendidikan adalah kebermutuan dari berbagai layanan institusi pendidikan kepada siswa maupun staf pengajar menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan untuk terjun ke lingkungan masyarakat (Sopiatin, 2010).

Mutu pendidikan dapat dilihat dari lima macam penilaian sebagai berikut :

1. Presentasi siswa yang dihubungkan dengan norma nasional dan agama dengan menggunakan skala nilai.
2. Presentasi siswa yang berhubungan dengan kemampuan.
3. Kualitas belajar mengajar

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Keuangan Pendidikan

1. Pengelolaan BOS dan BOPDA Menurut Azas Keuangan Negara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, maka di dalamnya antara lain terdapat Standar Pengelolaan. Pengelolaan sekolah atau manajemen sekolah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan manajemen pada lembaga-lembaga lain baik yang bersifat komersial seperti perusahaan-perusahaan industri, perdagangan, bisnis maupun pada lembaga-lembaga non komersial seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat. Semua manajemen menunjukkan suatu tindakan untuk menggerakkan dan mengerahkan seluruh *resources* yang ada untuk tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 31 ayat 2 bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menyelenggarakan suatu system pendidikan yang menyeluruh, termasuk dalam pengelolaan keuangan pendidikan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar disekolah.²⁴

Demikian pula halnya dengan manajemen sekolah merupakan suatu usaha atau aktivitas untuk mengelola sumber-sumber yang ada dalam sekolah untuk diarahkan mencapai tujuan sekolah melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.²⁵

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmiah artinya langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai peningkatan mutu tersebut hendaknya dapat dipertanggung jawabkan dari sisi keilmuan, mulai dari mengumpulkan informasi dan data, analisa, identifikasi permasalahan, merumuskan alternatif pemecahan, uji coba sampai pada tahap implementasi, dan evaluasinya. Selain itu juga hendaknya menggunakan pendekatan sistimik, bahwa manajemen sekolah harus dipandang sebagai suatu sistim yang di

24 E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: Rosdakarya, 2004),47

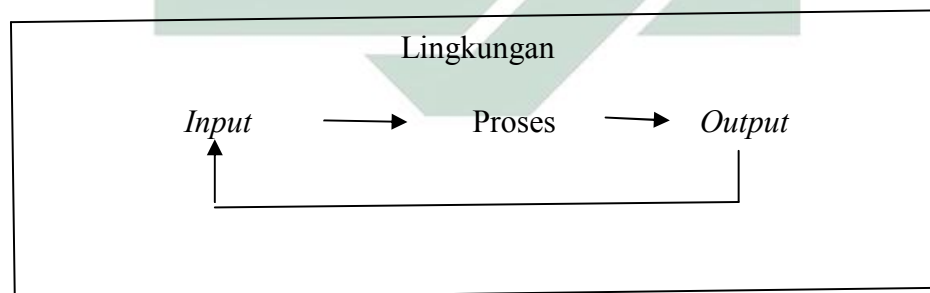
25 Engkoswara dan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta 2010) 89

dalamnya terdapat komponen *in put*, komponen proses dan komponen *out put* dan *out come*.²⁶

Tiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, karenanya ketiga komponen tersebut harus mendapat perhatian dan perlakuan yang seimbang. Setiap upaya untuk meningkatkan mutu *out put* tentu harus dilakukan upaya meningkatkan mutu proses, dan upaya untuk meningkatkan mutu proses harus memperhatikan karakteristik *in put* yang ada. Jadi manajemen berbasis sekolah sebagai sistim manajemen kualitas adalah tindakan mengelola, mengendalikan, meningkatkan kualitas komponen *in put*, proses dan *out put*.²⁷

Berikut ini diagram yang memperlihatkan hubungan komponen-komponen manajemen berbasis sekolah sebagai sistem manajemen kualitas :

Tabel 2.1



Pendidikan sebagai sistim²⁸

26 Departemen Pendidikan Nasional, (2007), 30

27 Ibid, 31

28 Engkoswara dan Komariah,, 143

Salah satu komponen *input* dalam pengelolaan sekolah adalah komponen biaya. Istilah pengelolaan sekolah atau manajemen pendidikan menurut Mulyati dan Komariah adalah merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif.²⁹

Selanjutnya menurut Engkoswara dan Komariah³⁰ dilakukan pengelolaan agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif dan efisien. Dalam kaitan dengan penelitian ini pengelolaan sekolah mendayagunakan sumber-sumber : visi, misi dan tujuan sekolah, sejarah dan pengalaman sekolah, lokasi atau letak sekolah, kebijakan Yayasan, siswa dan prestasinya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana prasarana, orang tua, kurikulum, proses pembelajaran, pelatihan dan bimbingan, alumni, informasi secara efisien dan sistemik untuk mencapai peningkatan mutu dan akses pendidikan secara tepat. Jadi gambaran umum suatu sekolah dalam penelitian ini adalah menunjukkan *in put* atau sumber-sumber yang ada di sekolah yang dikelola melalui dana BOS-BOPDA, sedangkan *out put* yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas delapan komponen standar nasional pendidikan.

29 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta 2009),87

30 Engkoswara dan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta 2010):89

Berbagai unsur atau faktor harus dikelola dalam suatu sekolah seperti pengelolaan , unsur tenaga kependidikan dan non kependidikan, sarana-prasarana, sistim, mekanisme dan prosedur organisasi, kesiswaan, kurikulum, dana atau pembiayaan. Pengelolaan Dana atau pembiayaan dalam sekolah khususnya pada sekolah swasta pada dasarnya dihadapkan dua masalah dasar yaitu :

1. Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh, yaitu dari mana dana-dana dapat diperoleh.
2. Untuk membiayai apa dana-dana tersebut ?³¹

Sumber keuangan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:

- (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan;
- (2) orang tua atau peserta didik;
- (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.

Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan, Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan

31 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 1* , (Bandung : Imperial Bakti Utama2007), 256

gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya, biaya pembelian atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai³²

Menurut Gaffar sistem pembiayaan harus diikuti oleh pengelolaan keuangan, pengelolaannya tergantung kepada sistem itu cukup efisien atau tidak. Pembiayaan bukan faktor yang mempengaruhi mutu, tetapi pembiayaan salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan.³³

Pengelolaan BOS dan BOPDA di SMP Swasta merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan sekolah yang berasal dari bantuan pemerintah yang besarnya dihitung per murid diharapkan dapat memberi dampak positif bagi program sekolah, dan memperbesar volume anggaran sekolah yang pada akhirnya dapat memberi kontribusi pada peningkatan mutu sekolah dan akses pendidikan. Besar kecilnya kontribusi tersebut tentu bergantung pada jumlah dana yang tersedia, dan sistem pengelolaannya cukup efisien atau tidak. Menurut Suryadi dan Tilaar sebagian besar studi mengenai biaya pendidikan mengungkapkan bahwa besarnya biaya yang secara nyata dialokasikan kepada murid-murid secara individual memiliki efek positif terhadap prestasi belajar murid. Akan tetapi sebagian dari studi-studi tersebut menemukan bahwa besarnya anggaran

32 . Sulistyorini, M.Pd, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Teras, Yogyakarta, 2009), 130-131

33 M.F. Gaffar, *Visi Suatu Inovasi dalam Proses Manajemen Startegik Perguruan Tinggi*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar, Bandung :IKIP Bandung 1994) ,87

pendidikan tidak memiliki efek terhadap prestasi belajar murid. Dengan demikian, biaya yang benar-benar dialokasikan kepada murid untuk belajar ternyata lebih berpengaruh daripada besarnya seluruh anggaran pendidikan semata-mata ³⁴

Menurut Pedoman Bantuan Operasional Sekolah, melalui program BOS warga sekolah diharapkan dapat mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut : (1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, (2) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah, (3) Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun tahunan, (4) Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) dimana dana BOS merupakan bagian integral di dalamnya, (5) Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau Yayasan (untuk sekolah swasta). Seluruh peserta rapat ikut tanda tangan berita acara persetujuan.³⁵

Salah satu masalah pokok dalam pengelolaan pembiayaan sekolah khususnya pengelolaan BOPDA dan BOS adalah masalah penganggaran, yaitu bahwa

34 Suryadi, Ace, dan Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar* (Bandung : Remaja Rosdakarya 1994), 117

35 Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Panduan Bantuan Operasional Sekolah*, (Jakarta 2012), 12

masalah penganggaran tidak hanya terkait dengan berapa banyak uang yang tersedia tetapi juga terkait dengan pengalokasian uang yang tersedia tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah secara efektif dan efisien.

Menurut Danim berkaitan dengan penganggaran disadari sepenuhnya bahwa operasi institusi pendidikan persekolah belum didukung oleh pendanaan yang memadai, baik dari pemerintah mau-pun masyarakat. Persoalan sekolah kita bukan hanya terletak pada minimnya dana, melainkan di sana sini masih ditemukan distorsi atau deviasi penggunaannya. Telah tumbuh kesadaran pada masyarakat pendidikan bahwa uang tidak mampu me-nyelesaikan semua persoalan. Di tengah-tengah keterbatasan itu, sistem penganggaran di sekolah harus digerakkan oleh misi yang jelas.³⁶

Mengutip Pendapat Pidarta : Kegiatan pendidikan baik yang baru direncanakan maupun yang rutin menggunakan dana yang dialokasi lewat perencanaan budget di atas. Di sini tampak bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan terutama yang rutin tidak selalu direncanakan secara teliti tiap tahun, sebaliknya pembiayaannya selalu diusahakan dialokasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa dana itu sangat terbatas, oleh karenanya perlu diatur sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak secara merata.³⁷

36 Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 139

37 Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem*. (Jakarta : Rineka Cipta 2005), 134

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa sekolah sebagai suatu lembaga yang sumber-sumber di antaranya sumber dana atau keuangan, maka dalam hal ini manajemen sekolah tidak terlepas dari manajemen keuangan

Dalam sejarah perkembangan dunia bisnis, masalah mengelola keuangan memang menjadi sentral, seperti halnya masalah pemasaran atau produksi dalam mencapai tujuan perusahaan. Kegagalan dalam mendapatkan dana, misalnya dapat mempengaruhi kegiatan operasional secara keseluruhan. Karena kurangnya dana, bagian pemasaran akan mengurangi tenaga penjualannya (*sales*) atau memotong biaya promosi meskipun tahu bahwa tenaga sales merupakan ujung tombak bagi penjualan produk. Demikian pula halnya dalam unit produksi, ada beberapa proses produksi akan mengurangi kapasitas produksi. Pengaruhnya adalah unit *cost product* menjadi semakin mahal. Keadaan ini akan berdampak pada harga jual yang tidak kompetitif lagi.

Dari ilustrasi tersebut tampak bahwa manajemen keuangan member pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Namun demikian sebagai bagian dari *system* secara keseluruhan, manajemen keuangan tidak bisa berdiri sendiri. Artinya mengabaikan peran dan fungsi bagian-bagian yang lain. Manajemen keuangan akan lebih efektif jika semua bagian melakukan sinergi, saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu manajemen keuangan bisa diartikan suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan

dengan menggerakkan tenaga orang lain.³⁸ Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.³⁹

Adapun Marno dan Triyono Supriyanto memberikan definisi tentang manajemen keuangan sebagai pengelolaan atas fungsi-fungsi keuangan, yakni fungsi bagaimana pihak manajemen mampu menghimpun dana (*raising of funds*) dan mengalokasikan (*allocation of funds*) dana tersebut sehingga tujuan organisasi pendidikan tercapai secara efektif dan efisien.⁴⁰

Manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.⁴¹

Manajemen Keuangan secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efesiaensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan

38 Maisyaroh, *Manajemen Pendidikan Analisis Subtantif dan Aplikasinya dalam Intitusi Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003) 97

39 James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Penerj. :(Heru Sutojo. Jakarta: Salemba Empat, 1997) 2

40 Marno dan Triyo Supriyanto, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Bandung : PT. Refika Aditna, 2008). 77

41 Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Teras, Yogyakarta, 2009), 129-130

menyeluruh yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.⁴² Begitu pula dalam manajemen keuangan di sekolah kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban.

Istilah manajemen keuangan berkembang seiring perkembangan fungsi-fungsi yang lain. Ada yang menyebut manajemen keuangan sebagai pembelanjaan karena materi yang dikaji pada intinya merupakan aktifitas pemebelanjaan sekolah. Ada lagi yang menyebut sebagai administrasi keuangan karena administrasi identik dengan manajemen.⁴³

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dan serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Dilihat dari beberapa pendapat di atas terlihat bahwa manajemen keuangan tidak terpisahkan dari manajemen secara umum karena proses dan aktivitas manajemen keuangan tidak terlepas dari tujuan manajemen guna mencapai tujuan organisasi secara umum.

Menurut Arikunto mengemukakan bahwa masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan *budgeting* atau pembiayaan, sedangkan masalah-masalah pembiayaan itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan

42 Sri Minarti, Manajemen Sekolah (AR Ruzz Media Jogjakarta 2012) 213

43 Ibid.214

kehidupan suatu organisasi seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lain.⁴⁴

Dari uraian di atas jelaslah bahwa manajemen keuangan pendidikan merupakan proses pengelolaan keuangan sekolah yang berkaitan dengan sumber peneriman dan alokasi pengeluaran dana. Untuk itu semua harus ada rumusan anggaran yang baik dan teliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana benar-benar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta nantinya dapat dipertanggung jawabkan.

Berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, Liphon (dalam Mulyasa 2002:174) mengungkapkan bahwa terdapat empat fase kegiatan pokok: pertama merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan dengan analisis biaya efektif dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Kedua, mempersiapkan anggaran yang berlaku : bentuknya, distribusi dan sasaran program perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia. Ketiga, mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembuktian, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Keempat, menilai pelaksanaan anggaran

44 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), 90

yaitu menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang. Sedangkan Costa (2000 : 175) : Pengelolaan keuangan memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik.⁴⁵

Selain masalah anggaran sebagaimana dibahas di atas, masalah yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan BOS-BOPDA adalah masalah akuntabilitas dan transparansi.

Menurut pendapat Pidarta penjelasan lebih mendetail dikemukakan oleh Elliot, yang mengatakan bahwa akuntabilitas adalah cocok atau sesuai (*fittingin*) dengan peranan yang diharapkan oleh orang lain dan (2) menjelaskan dan mempertimbangkan kepada orang lain tentang keputusan dan tindakan yang diambilnya. Akuntabilitas yang dimaksud di sini adalah suatu performan yang cocok dan meminta pertimbangan/ penjelasan kepada orang lain.⁴⁶

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab Tim Pengelola BOS-BOPDA harus mampu menunjukkan akuntabilitasnya kepada pemberi hibah (pemerintah), dan pihak-pihak yang menikmati dan berkepentingan dengan pengelolaan BOS-BOPDA seperti guru, siswa dan orang tua murid. Pertama akuntabilitas Kepala

45 Vincent Costa, *Panduan Pelatihan Untuk Mengembangkan Sekolah*, (Jakarta : Depdiknas2000),175

46 Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem*. (Jakarta : Rineka Cipta 2005).,164

sekolah dalam pengelolaan dana ini harus cocok dengan harapan pemerintah sebagai pemberi hibah dan sekaligus pemilik program yang tercermin dalam Pedoman Penggunaan BOS-BOPDA. Akuntabilitas yang ke dua yaitu Kepala sekolah harus mampu menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (warga sekolah) tentang berbagai kebijakannya dalam pengelolaan, misalnya skala prioritas yang ditetapkan dalam pro-gram-program yang dibiayai dengan dana tersebut. Untuk itu supaya kebijakannya sesuai dengan harapan warga sekolah, maka Kepala sekolah bersikap terbuka terhadap usulan dan harapan warga sekolah. Jadi keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BOS-BOPDA bagai dua sisi mata uang yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan transparansi sekolah adalah : Keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Dalam pengelolaan BOS-BOPDA istilah transparansi yaitu kepolosan, apa adanya tidak berbohong, tidak curang, jujur terhadap publik terhadap apa yang akan dan telah dikerjakan dalam pengelolaan BOS-BOPDA.⁴⁷

Sesuai dengan berbagai teori tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BOS-BOPDA merupakan bagian dari manajemen keuangan meliputi tiga bidang kegiatan:

⁴⁷ <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/tgl01/04/2010>

kependidikan (b) sarana-prasarana, (c) kurikulum, (d) siswa, (e) proses pembelajaran, (f) peraturan-peraturan, (g) alumni, (h) orang tua murid, (i) uang, (j) informasi.⁴⁸

Khusus sumber dalam bentuk uang, merupakan sumber penting yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaannya, karena sumber uang ini dapat berpengaruh luas terhadap sumber-sumber lainnya. Hampir tidak ada kegiatan sekolah dalam menggerakkan sumber-sumber tanpa disertai uang, artinya uang yang ada dialokasikan untuk semua kegiatan sekolah. Kegiatan mengalokasikan uang untuk semua kegiatan sekolah tersebut sering dinamakan dengan menganggarkan. Uang bagi sekolah adalah ibarat darah dalam tubuh manusia yang mati hidupnya ditentukan oleh sirkulasi darah. Jadi anggaran sekolah menampakkan kegiatan-kegiatan sekolah yang dinyatakan dengan satuan uang dan dari sumber mana uang itu diperoleh.

Menurut *Governmental Accounting Standarts Board* (GASB), definisi Anggaran (budget) sebagai berikut : ”....Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”.⁴⁹ Selanjutnya dikatakan bahwa Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting,

48 Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem*. (Jakarta : Rineka Cipta 2005), 115

49 Sumarsono, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2009), 47

karena anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang.

Adapun fungsi anggaran adalah :

- a) anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja
- b) anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang
- c) anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
- d) anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
- e) anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi
- f) anggaran merupakan instrumen politik
- g) anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.⁵⁰

Sekolah adalah sektor publik yang memberi layanan khas yaitu proses pembelajaran, bimbingan dan latihan kepada anak didik. Anggaran dalam pendidikan berbeda dengan anggaran perusahaan, karena pendidikan merupakan lembaga publik yang nirlaba, sedangkan perusahaan adalah lembaga yang berorientasi kepada keuntungan. Anggaran lembaga pendidikan berorientasi kepada misi yang ingin dicapainya sesuai dengan

50 Ibid, 47

karakteristiknya, sedangkan anggaran perusahaan berorientasi kepada misi untuk memperoleh profit atau keuntungan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Anggaran sekolah memberikan gambaran ke arah mana sekolah itu akan dibawa atau digerakkan.

Berkaitan dengan pengelolaan BOS-BOPDA, maka dana BOS-BOPDA merupakan salah sumber penting pendapatan dalam anggaran sekolah selain sumber-sumber dari orang tua, Yayasan, dana hibah, donatur, hasil usaha. Seberapa besar kontribusi dana tersebut pada anggaran sekolah tergantung kepada perbandingan antara dana BOS-BOPDA terhadap anggaran sekolah secara keseluruhan. Makin besar bagian atau proporsi dana BOS-BOPDA pada anggaran sekolah menunjukkan makin besar tingkat ketergantungan sekolah itu kepada dana BOS-BOPDA dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah tersebut.

B. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan

1. Pengertian Akses Pendidikan

Kata akses berasal dari bahasa Inggris *access* artinya jalan masuk, dapat didekati. Dalam hubungan dengan pendidikan, maka Akses pendidikan adalah kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada tingkat usia tertentu sesuai dengan jenjang pendidikannya, yang menggunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah disingkat APK, yaitu ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Setiap negara di dunia mempunyai

kewajiban kepada setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan menikmati pendidikan dasar. Negara menyediakan sistem pendidikan dasar yang dapat menyerap seluruh anak pada usianya.

2. Indikator Akses Pendidikan

Adalah Jumlah siswa usia sekolah yang dapat ditampung di suatu sekolah, yaitu dengan menghitung jumlah siswa yang dapat ditampung di suatu sekolah berdasarkan kepada tersedianya ruang kelas belajar, di mana tiap-tiap ruang kelas belajar dalam kondisi layak untuk dipergunakan sebagai ruang belajar siswa. Selain indikator di atas, dapat juga menggunakan indikator keterjangkauan pembiayaan sekolah oleh orang tua dari golongan ekonomi tidak mampu dengan ditandai adanya keringanan atau-pun pembebasan SPP dan adanya subsidi silang dalam pembiayaan.

Ketersediaan sarana-prasarana belajar dan keterjangkauan pembiayaan oleh masyarakat dalam membiayai pendidikan anak mereka merupakan dua faktor penting yang mempengaruhi akses pendidikan. Walaupun ada sarana-prasarana belajar yang cukup tetapi bila beban biaya pendidikan tidak dapat dipikul oleh orang tua, tentu anak mereka tidak dapat memperoleh kesempatan atau tidak mampu mengakses pendidikan, lebih-lebih pendidikan yang bermutu yang umumnya memerlukan biaya yang besar. Menurut Suryadi dan Tilaar⁵¹ : Sejak awal tahun 1970-an , pemerintah mulai

51 Ace Suryadi , dan Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar* (Bandung : Remaja Rosdakarya), 18

merintis program perluasan kesempatan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat, pada semua jenjang dan jenis pendidikan khususnya kesempatan memperoleh pendidikan dasar.

Program penting yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan ini adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang telah dinyatakan tuntas pada tahun 2008. Walaupun sudah dinyatakan tuntas, namun pada kenyataannya ada 76 kabupaten yang APK-nya masih di bawah 80% (Kementerian Pendidikan Nasional 2010). Berdasarkan kenyataan ini, maka persoalan akses pendidikan masih merupakan persoalan yang harus terus mendapat perhatian dan pemecahannya. Menurut Suryadi dan Tilaar⁵² : mereka yang belum memiliki kesempatan bersekolah karena beberapa faktor, di antaranya karena secara ekonomis kurang mampu, tinggal di daerah terpencil, anak-anak yang cacat fisik, dan penduduk yang berpindah-pindah.

Dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.⁵³ Amanat undang-undang tersebut menunjukkan jaminan ketersediaan akses pendidikan setidaknya-tidaknya dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama, bagi seluruh warga negara Indonesia.

52 Ibid ; 19

53 Afnil Guza SS, *Undang-undang Sisdiknas*, (Asa Mandiri 2008), 17

Untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut, maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan program BOS, sedangkan Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Program BOPDA, yang secara khusus tujuannya berkaitan dengan peningkatan akses pendidikan adalah menggratiskan seluruh siswa miskin dari segala pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.⁵⁴

3. Pengertian mutu sekolah

Secara umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, mutu juga bisa didefinisikan relative memandang bukan sebagai atribut produk atau layanan. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi standar spesifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terahir sudah sesuai standar atau belum.⁵⁵

Mutu sekolah menunjuk kepada dua faktor, yaitu derajat layanan sekolah yang dapat diberikan oleh sekolah kepada pihak-pihak yang memerlukan jasa sekolah, yang mengacu kepada delapan standar nasional pendidikan, dan faktor yang lain adalah out put yang dihasilkan yaitu mutu lulusan dari sekolah tersebut.

⁵⁴ Kementrian Pendidikan Nasional (2013), 297

⁵⁵ Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan, Teori & Aplikasi,(AR-RRuz Media, Jogjakarta, 2011),56

Menurut Danim dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu kepada masukan, proses, keluaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa. Ke dua, memenuhi atau tidaknya kreteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana sarana sekolah dan lain-lain. Ke tiga memenuhi atau tidaknya masukan berupa perangkat lunak seperti peraturan, struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. Ke empat mutu masukan yang berupa harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita⁵⁶

Menurut Edward Sallis, mutu dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Mutu dalam percakapan sehari-hari sebgaiian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut. Sebagai suatu konsep yang absolut mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar, merupakan suatu idialisme yang tidak dapat dikompromikan. Dalam definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari sandar yang sangat tinggi dan tidak dapat di ungguli.⁵⁷

Menurut Umi Hanik, mutu sekolah harus senantiasa meningkat karena itu diperlukan strategi pengembangan mutu sebagai berikut:

- a. Pengembangan SDM , sarana prasarana

56 Sudarwan Danim, , *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara2008),53

57 Edwad Sallis, *Total Quality Management in Education*, (Yogjakarta Ircisod 2006),51

- b. Pengembangan institusi
- c. Proses kerja
- d. Suasana kondusif

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mutu sekolah adalah kemampuan sekolah dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta motivasi pegawai dengan memperhatikan faktor-faktor dan komponen yang mengindikasikan tentang peningkatan mutu sekolah sendiri.

4. Faktor penentu mutu sekolah

Adapun Sergiovanni (dalam Sagala, 2004)⁵⁸ mengatakan bahwa tujuan persekolahan adalah menjamin dan pemahaman yang telah ditentukan bagi semua anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada sejumlah faktor yang dapat menentukan kinerja sekolah, yaitu; (1) manajemen kurikulum yang lugas dan fleksibel berpedoman pada standar nasional; (2) proses belajar mengajar yang efektif; (3) lingkungan sekolah yang sehat; (4) sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang handal; (5) standarisasi dan evaluasi hasil belajar. Lebih lanjut Sagala (2009)⁵⁹ mengungkapkan bahwa faktor yang menentukan kinerja sekolah antara lain: (a) Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, (b) Profesionalisme guru, (c) Dukungan tim ahli manajemen sekolah, (d)

58 Saiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta2009),53

59 Ibid, 178

Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, (e) Penggunaan secara optimal fasilitas belajar. (f) Ketersediaan anggaran yang mendukung penyelenggaraan program sekolah.

Menurut Suryadi dan Tilaar,⁶⁰ faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ialah faktor guru, buku pelajaran, proses, alat-alat pelajaran, manajemen sekolah, besarnya kelas sekolah, dan faktor keluarga

5. Indikator mutu sekolah

Pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada pasal 1, ayat 1 disebutkan bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan lingkup standar nasional Pendidikan meliputi

- a. Standar isi;
- b. Standar proses;
- c. Standar kompetensi lulusan;
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Standar sarana dan prasarana;
- f. Standar pengelolaan;
- g. Standar pembiayaan; dan

60 Ace Suryadi dan Tilaar, (1994), *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar* Bandung : Remaja Rosdakarya : 111

h. Standar penilaian pendidikan

Dari Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menunjukkan bahwa kinerja sekolah diukur dengan mencakup delapan komponen utama; yaitu: (1) standar isi (kurikulum); (2) Proses Belajar Mengajar; (3) standar kompetensi lulusan; (4) tenaga pendidik dan kependidikan; (5) sarana dan prasarana; (6) mana-jemen/ pengelolaan; (7) pembiayaan pendidikan; dan (8) penilaian

Sedangkan *Shannon* dalam Engkoswara dan Komariah,⁶¹ mengidentifikasi sembilan karakteristik yang dapat dipakai sebagai indikator sekolah yang bermutu yaitu :

- a. *A clear and shared focus*
- b. *High standards and expectation for all students*
- c. *Effective school leadership*
- d. *High levels of collaboration and communication*
- e. *Curriculum, instruction and assessments aligned with state standards*
- f. *Frequent monitoring of learning and teaching*
- g. *Focused professional development*
- h. *A supportive learning enviroment*
- i. *High levels of family and community involvement*

61 Engkoswara dan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta 2010),311

Sedangkan menurut Carpenter dalam Pidarta⁶² mengemukakan prinsip-prinsip efektifitas sebagai berikut :

1. Menilai efektifitas adalah berkaitan dengan problem tujuan dan alat memproses *in put* untuk menjadi *out put*. Tujuan atau *out put* harus sesuai dengan kreteria
2. Sistem yang dibandingkan harus sama, kecuali alat pemrosesannya. Misalnya tingkat pendidikan siswa, kemampuan sosial ekonomi dan sebagainya harus homogen
3. Mempertimbangkan semua out put utama. Dalam pendidikan misalnya dalam pendidikan misalnya yang dikatakan out put utama adalah jumlah siswa yang lulus, kualitas lulusan, dan penilaian bersifat kontinu
4. Korelasi diharapkan bersifat kausalitas. Yaitu korelasi alat pemroses dengan output bersifat kausalitas

Menurut Nur Hasan, indicator atau kreteria yang dapat di jadikan tolak ukur mutu pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Hasil akhir pendidikan

62 Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem*. (Jakarta : Rineka Cipta 2005), 159

2. Hasil Langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan
3. Proses pendidikan
4. Instrumen *input*, yaitu alat berinteraksi dengan *raw input* (siswa)
5. *Raw input* dan lingkungan ⁶³

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka pengelolaan BOS-BOPDA yang dikaitkan dengan peningkatan mutu pendidikan dalam penelitian ini adalah tingkat pemenuhan delapan komponen standar nasional pendidikan sebagai ukuran efektivitas pengelolaan, sedangkan proses pengelolaan sebagai masukan sehingga efisiensi dapat ditentukan, artinya bila teknik dan tata cara pengelolaan dilakukan dengan tepat dan benar, maka dapat dikatakan bahwa prinsip efisiensi telah dijalankan.

63 Nur Hasan, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk abad 21 Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Mutu Pendidikan* (Jakarta, PT Sindo,1994)390

- berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga Negara
5. Konstitusi Negara meliputi : Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi
 6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi
 7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
 8. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

- b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.
- c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.
- d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan.
- e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (*dignity*).

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini.

Tabel 3.6

Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

NILAI	DESKRIPSI
1. Islami	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan syari'at islam berhaluan ahlus sunnah waljama'ah.
2. Tasamuh (toleransi)	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya, dan hidup rukun.
3. Tawassuth (Moderat)	Sikap tengah-tengah (tidak ekstrim)
4. Tawazun (Seimbang)	Sikap seimbang dalam segala hal
5. I'tidal (Teguh)	Memiliki komitmen kuat dalam membela kebenaran
6. Shiddiq (Jujur)	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
7. Amanah (Tanggung Jawab)	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
8. Qona'ah (Realistis)	Sikap menerima kenyataan
9. Tawadhu' (Hormat)	Sikap menghormati orang lain
10. Ikhlas (Tanpa pamrih)	Melakukan suatu perbuatan untuk dan karena Allah
11. Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
12. Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
13. Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
14. Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
15. Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

	2	<i>Al 'Alaq</i>	
--	---	-----------------	--

b. Fiqh

Kelas	Semester	Nama Kegiatan	Keterangan
VII	1	a. Wudlu b. Mandi Besar c. Tayammum d. Sholat Wajib	Tingkat penilaian terbagi menjadi 4 kategori, yaitu: a. Sempurna antara syarat, sunnah, rukun, dan bacaan-bacaanya dalam praktek ibadah. b. Sempurna rukun dan bacaan-bacaannya saja. c. Sempurna bacaan-bacaanya tapi kurang dalam prakteknya. d. Praktek dan bacaannya tidak bisa.
	2	Tata cara Menghilangkan najis: a. <i>Mukhoffafah</i> b. <i>Mugholladhoh</i> c. <i>Mutawassithoh</i> d. Sholat Jum,at	
VIII	1	f. Praktek shotat sunnah dengan bacaan dan gerakan yang benar g. Praktek macam-macam sujud	
	2	a. Praktek sholat berjamaah dan <i>ma'mum masbuq</i> b. Sholat jama' dan qoshor c. Sholat tarowih d. Sholat witr e. Sholatjenazah f. Praktek merawat jenazah	
IX	1	Praktek mengeluarkan zakat dengan niat dan do'anya	
	2	Praktek ManasikHaji	

c. Aswaja

Kelas	Semester	Nama Kegiatan	Keterangan
VII	1	<ul style="list-style-type: none"> Hafal dengan fasih <i>Sholawat Nariyah</i> Mampu membaca surat: <i>Yasin, Al Waqi'ah, Ar Rahman, Al Mulk</i> 	Tingkat penilaian terbagi menjadi 4 kategore, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Hafal dan tartil Hafal tidak tartil Tidak hafal tapi tartil Tidak hafal dan tidak tartil
	2	<ul style="list-style-type: none"> Hafal dengan fasih adzan dan iqomah serta do'a sesudahnya 	
VIII	1	<ul style="list-style-type: none"> Mampu membaca surat <i>Yasin, Al Waqi'ah, Ar Rohman, Al Mulk</i> 	
	2	<ul style="list-style-type: none"> Hafal dengan fasih dan mengamalkan wirid dan do'a setelah sholat fardlu 	
IX	1	<ul style="list-style-type: none"> Membaca tahlil dan Istighotsah dengan benar. Mampu membaca surat: <i>Yasin, Al Waqi'ah, Ar Rohman, Al Mulk</i> 	
	2	<ul style="list-style-type: none"> Praktek membaca dan melantunkan diba' dengan lagu yang indah 	

Tabel 3.12.

Data Ruang Belajar Lainnya

Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi*)	Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi
1. Perpustakaan	1	9 x 20	Baik	6. Lab. Bahasa	1	13 x 9	Rusak Ringan
2. Lab. IPA	2	8 x 8	Baik	7. Lab. Komputer	1	12 x 9	Baik
3. Ketrampilan				8. PTD			
4. Multimedia				9. Serbaguna/aula	1	15 x 30	Rusak Ringan
5. Kesenian				10. Auditorium	1	20 x 9	Baik

Diadaptasi dari data sekolah

Tabel 3.13

Data Ruang Kantor

Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi*)
1. Kepala Sekolah	1	6 x 4	Baik
2. Wakil Kepala Sekolah	1	6 x 4	Baik
3. Guru	1	8 x 8	Baik
4. Tata Usaha	1	8 x 8	Baik
5. Tamu	1	6 x 4	Baik
Lainnya:			

Diadaptasi dari data sekolah

Tabel 3.14

Data Ruang Penunjang

Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi*)	Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi
1. Gudang	2	9 m ²	Baik	11. Ibadah	1	112 m ²	Baik
2. Dapur			Baik	12. Ganti	1	24 m ²	-
3. Reproduksi			-	13. Koperasi	1	24 m ²	-
4. KM/WC Guru	1	4 m ²	Baik	14. Hall / lobi			
5. KM/WC Siswa	1	4 m ²		15. Kantin			
6. BK	4	24 m ²	Baik	16. Rumah Pompa / Menara air			
7. UKS	1	48 m ²	Baik	17. Bangsal Kendaraan			
8. PMR/Pramuka	1	24 m ²	Baik	18. Rumah Penjaga			
9. OSIS			-	19. Pos Jaga			

Diadaptasi dari data sekolah

Tabel 3.15

Lapangan Olahraga dan Upacara

Lapangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi	Keterangan
1. Lapangan Olahraga				
a. Basket	1	19 x 35	Baik	
b. Volley	1	8 X 15	Baik	
c. Bulu tangkis				
d.	1	15 X 25	Baik	
e.				
2. Lapangan Upacara	1	15 X 32	Baik	Satu lokasi dengan lap.basket

Diadaptasi dari data sekolah

Tabel 3.25

Jumlah dan Persentase Siswa *Drop-Out* (tiga tahun terakhir)

No.	Kelas	Jumlah dan persentase siswa <i>drop-out</i>			
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	VII	0%	0%	0%	0%
2	VIII	0%	0%	0%	0%
3	IX	0%	0%	0%	0%
	Total (%)	0%	0%	0%	0%

Diadaptasi dari data sekolah

Tabel 3.26

Jumlah dan Persentase Siswa Yang Terancam *Drop-Out*
(tiga tahun terakhir)

No.	Kelas	Jumlah dan persentase siswa tencam <i>drop-out</i>			
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	VII	0%	0%	0%	0%
2	VIII	0%	0%	0%	0%
3	IX	0%	0%	0%	0%
	Total (%)	0%	0%	0%	0%

Diadaptasi dari data sekolah

Siswa SMP Khadijah sebagian besar berasal dari keluarga menengah keatas atau keluarga mampu dan sebagian kecil berasal dari keluarga menengah ke bawah. Sedangkan pekerjaan orang tua siswa Siswa SMP Khadijah adalah Wiraswasta, PNS, TNI/ Polri, Politisi dan lain sebagainya.

Tabel 3.27

Pekerjaan Orang Tua / Wali Siswa

No.	Pekerjaan	Persentase
1	PNS	27,74%
2	TNI / POLRI	3,05%
3	Petani	0,15%
4	Swasta	31,40%
5	Nelayan	5%
6	Politisi (misalnya anggota DPR)	10%
7	Perangkat Desa	5,32%
8	Pedagang	16,34%
9	Buruh	1%

Diadaptasi dari data sekolah

Tabel 3.28

Penghasilan Orang Tua / wali (gabungan kedua orangtua) Siswa

No.	Pekerjaan	Persentase
1	Kurang dari Rp. 500.000	8,08%
2	Antara Rp 500.000 s.d. Rp 1.000.000	21,80%
3	Antara Rp 1.000.000 s.d. Rp 1.500.000	19,05%
4	Antara Rp 1.500.000 s.d. Rp 2.000.000	29,72%
5	Lebih dari Rp 2.000.000	21,35%

Diadaptasi dari data sekolah

Tabel 3.29

Tingkat Kesejahteraan Orang Tua / Wali Siswa

No.	Tingkat Kesejahteraan	Persentase
1	Pra Sejahtera	8,08%
2	Sejahtera I	21,80%
3	Sejahtera II	19,05%
4	Purna Sejahtera	51,07%

Diadaptasi dari data sekolah

Belanja hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah swasta sebagai berikut:

- a. biaya alat tulis sekolah (ATS);
- b. biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP);
- c. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
- d. biaya transport;
- e. biaya konsumsi;
- f. biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler;
- g. biaya uji kompetensi;
- h. biaya praktek kerja industri;
- i. biaya pelaporan;
- j. biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. biaya pengembangan kurikulum;
- l. pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;

Dalam mengelola pembelanjaan dana yang bersumber dari BOS-BOPDA tersebut tidak lepas dari prinsip-prinsip manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dari penggunaan dana-dana tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan dana BOS BOPDA dipaparkan :

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pelaksanaan
- d. Pengawasan,

yang terkait dengan efektifitas yang dihubungkan dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan mengacu kepada delapan standar nasional pendidikan (SNP) dan peningkatan akses pendidikan yang mengacu kepada pelaksanaan subsidi silang di sekolah ini. Penjelasan atas Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tersebut dikatakan Azas-Azas umum Pengelolaan Keuangan Negara sebagai berikut : (1) Azas akuntabilitas berorientasi pada hasil, (2) azas profesionalitas, (3) azas proporsionalitas, (4) azas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan (5) azas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Berdasarkan Penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pengelolaan BOS-BOPDA harus dikelola secara profesional artinya pengelolaannya harus didasarkan kepada Prinsip-Prinsip manajemen, dapat dipertanggungjawabkan yang berorientasi kepada hasil yaitu delapan standar Nasional Pendidikan dan peningkatan akses pendidikan, serta terbuka dengan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, sebanding dengan kebutuhan atau ke-perluannya, dan dapat diperiksa oleh akuntan Publik atau badan-badan yang berwenang dalam pemeriksaan keuangan.

a. Perencanaan Pengelolaan BOS-BOPDA di SMP Khadijah Surabaya

Perencanaan pengelolaan BOS-BOPDA di SMP Khadijah Surabaya terkait dengan penyusunan anggaran sekolah yang dananya bersumber dari BOS-BOPDA. Langkah pertama yang dilakukan adalah

menghitung berapa besar dana BOS-BOPDA yang dapat diperoleh dari Pemerintah, yaitu untuk BOS sebesar jumlah siswa X Rp.59.000,- per bulan dan BOPDA sebesar jumlah siswa X Rp.70.500,- per bulan. Langkah ke dua adalah melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang menyangkut dengan delapan SNP. Dalam proses EDS tersebut melibatkan sejumlah guru. Guru melakukan kajian sejauh mana capaian sekolah dari masing-masing komponen SNP tersebut. Misalnya dalam hal sarana dilakukan kajian sejauh mana sarana yang sudah ada, mana yang sudah memenuhi, mana yang belum mencapai standar dan sarana apa yang belum ada, sarana apa yang perlu pemeliharaan. Demikian hal pula dengan komponen-komponen lainnya. Dari hasil kajian ini dapat ditentukan prioritas pemenuhan baik melalui dana BOS-BOPDA maupun melalui dana Yayasan. Dalam proses pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan delapan SNP tersebut juga memperhatikan usulan Komite, dan persetujuan dari pihak Yayasan. Hasil dari rencana pemenuhan kebutuhan sekolah dalam waktu satu tahun maupun satu semester dituangkan dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) atau sering pula disebut dengan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah).

Hal-hal di atas dibuktikan dengan dokumen Rencana Strategis Pendidikan Yayasan Khadijah, Rencana Pengembangan Sekolah SMP Khadijah Surabaya Tahun 2011-2015, Hasil EDS, dan RAKS 2012-2013, notulen rapat-rapat

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pengelolaan BOS – BOPDA Menurut Azas Keuangan Negara

Kebijakan BOS-BOPDA merupakan kebijakan relatif baru, yaitu untuk BOS mulai tahun 1996 yang dananya bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan Nasional, dan BOPDA mulai tahun 2009 yang dananya bersumber dari APBD kota Surabaya. Kebijakan ini tidak lepas dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (4) yaitu Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Oleh karena dana BOS-BOPDA bersumber dari APBN dan APBD, maka pengelolaan kedua dana tersebut harus mengacu kepada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 (1), menggariskan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Atas Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tsb disebutkan Azas-Azas umum Pengelolaan Keuangan Negara sebagai berikut : Azas akuntabilitas berorientasi pada hasil, azas profesionalitas, azas proporsionalitas, azas keterbukaan dalam pengelolaan

keuangan negara, dan azas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri Dengan diadopsinya azas-azas umum tersebut, maka Pengelolaan BOPDA dan BOS oleh sekolah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Negara harus mengacu kepada azas-azas umum tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka pengelolaan BOPDA dan BOS di sekolah-sekolah tidak hanya dapat dipandang sebagai upaya memperbesar ketersediaan biaya penyelenggaraan pendidikan untuk memperluas akses dan mutu pendidikan, tetapi juga harus dipandang sebagai pengelolaan keuangan Negara. Jadi pengelolaan BOPDA oleh sekolah-sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta merupakan pengelolaan keuangan Negara yang diarahkan untuk memperbesar ketersediaan biaya penyelenggaraan pendidikan dalam rangka meningkatkan akses pendidikan khususnya program wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Tentu hal ini menuntut pengetahuan yang mendalam dan keahlian dalam mengelolanya. Peranan kepala sekolah selaku manajer sangat berpengaruh terhadap pengelolaan BOPDA dan BOS, seberapa jauh pengetahuan dan keahlian Kepala sekolah memahami Keuangan Negara dan kebutuhan-kebutuhan sekolah dalam upaya memenuhi peningkatan akses dan mutu pendidikan sekolahnya akan menjadi faktor yang penting untuk keberhasilan pengelolaan BOS-BOPDA tersebut. Pemahaman dan kemampuan mengimplementasikan Manajemen Keuangan menjadi tuntutan bagi setiap pengelola BOS-BOPDA. Implementasi manajemen keuangan di sekolah terletak pada kemampuan memperoleh

pendanaan dan pengelolaan dana dan kekayaan yang diarahkan untuk mencapai tujuan sekolah secara menyeluruh secara efisien. Di samping itu manajemen keuangan tidak terpisahkan dari manajemen secara umum, yaitu mengembangkan fungsi-fungsi manajemen. Demikian pula halnya dengan pengelolaan dana BOS-BOPDA tidak dapat dipisahkan dari manajemen sekolah, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Menetapkan sumber-sumber keuangan yang diperlukan dalam kegiatan sekolah, yaitu sumber orang tua, masyarakat, hasil usaha, pemerintah dan yayasan. Dana BOS-BOPDA merupakan sumber keuangan sekolah yang bersumber dari pemerintah
2. Melaksanakan pengelolaan BOS-BOPDA yang berpedoman pada teori manajemen yaitu:
 - a. Perencanaan
 - b. Pengorganisasian
 - c. Penggerakan (pengaktifan)
 - d. Pengendalian
3. Menganalisa persoalan-persoalan yang mungkin timbul berkaitan dengan pengelolaan BOS-BOPDA, yaitu akuntabilitas, transparansi karena pengelola BOS-BOPDA dituntut untuk dapat menjaga nilai kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang dikelolanya.

Pengelolaan BOS-BOPDA di sekolah merupakan keseluruhan pro-ses upaya memperoleh dan mendayagunakan dana BOS-BOPDA serta berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan dan menggunakan semua dana yang tersedia untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan catatan anggaran yang rinci menggambarkan penerimaan dan penggunaan sumber dana.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengelolaan BOS-BOPDA merupakan proses pengelolaan keuangan sekolah yang berkaitan dengan sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dana. Untuk itu semua harus ada rumusan anggaran yang baik dan teliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana benar-benar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

B. Analisis BOS-BOPDA Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan

Masalah akses pendidikan terkait dengan sejauh mana seluruh lembaga pendidikan yang ada dapat menampung penduduk usia sekolah, yang biasanya menggunakan ukuran secara kuantitatif yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK). Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional : Secara kuantitas, program Wajib Belajar Sembilan Tahun telah berhasil pada akhir tahun 2009, dengan indikator utama berupa pencapaian APK sebesar 98,11%, di mana program tersebut dinyatakan berhasil bila APK mencapai 95%.

Penjelasan di atas menunjukkan suatu pendekatan makro terhadap persoalan akses pendidikan. Namun secara mikro akses pendidikan seorang anak atau siswa dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus setara atau setingkat SMP (9 tahun). Realita menunjukkan masih ada penduduk yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau mengalami drop out, karena keadaan ekonomi, ketiadaan biaya atau mungkin karena lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi orang tuanya daripada memilih meneruskan sekolah.

Mengingat hal di atas, khususnya dari pandangan mikro terhadap persoalan akses pendidikan, maka program pembebasan SPP, keringanan SPP dan program subsidi silang dapat dipandang sebagai salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan akses pendidikan. Ini sesuai dengan Pedoman BOS dan Peraturan Wali Kota Surabaya No.20 Tahun 2012 : Salah satu tugas Sekolah dalam kaitannya dengan pengelolaan BOS-BOPDA adalah Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta Tim Sekolah meng-identifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran.

C. Analisis BOS-BOPDA Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah

Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu atau sekolah yang bermutu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat 2, Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu yang didasarkan kepada standar nasional pendidikan, maka pemerintah telah

menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Di dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tersebut dinyatakan ada delapan komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP), yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Seluruh penyelenggara pendidikan harus mengacu kepada tercapainya delapan standar nasional pendidikan tersebut. Demikian halnya kebijakan pemerintah untuk memberi hibah BOS-BOPDA kepada sekolah-sekolah swasta tidak lepas dari upaya peningkatan mutu yang mengacu pada pencapaian atau peningkatan delapan komponen standar nasional pendidikan.

Sekolah-sekolah sebagai penyelenggara pendidikan mempunyai kewajiban untuk berusaha melakukan upaya-upaya dalam rangka pencapaian delapan komponen standar nasional pendidikan, lebih-lebih pada sekolah yang menerima hibah BOS-BOPDA terikat dengan MoU dengan pemberi hibah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Surabaya. Di dalam MoU dan Perwali No.20 tahun 2012 tersebut dinyatakan bahwa hibah BOPDA hanya boleh dibelanjakan untuk : (a) Pengadaan alat tulis Sekolah; (b) biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP); (c) pemeliharaan dan perbaikan ringan; (d) biaya transport; (e) biaya konsumsi; (f) biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler; (g) biaya uji kompetensi; (h) biaya praktek kerja industri; (i) biaya pelaporan; (j) biaya

peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;(k) biaya pengembangan kurikulum; (l) pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran.

Sedangkan penggunaan dana BOS Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana BOS adalah :

(a) Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan atau mengganti buku teks yang sudah rusak; (b) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru seperti biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pengeluaran alat tulis, fotocopy, honor lembur, dan konsumsi panitia pendaftaran ulang siswa lama; (c) membiayai kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, KIR, pramuka, PMR, UKS dan sejenisnya; (d) membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar; (e) membeli bahan habis pakai untuk mendukung proses pembelajaran seperti kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk, buku inventaris; (f) membayar langganan daya dan jasa listrik, air dan telepon; (g) membayar biaya perawatan ringan sekolah seperti engecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya; (h) membayar honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer; (i) pengembangan profesi seperti membiayai pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS atau sejenisnya; (j) Memberi bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang

Rencana Pengembangan sekolah (RPS) melalui proses Evaluasi Diri

Sekolah mengacu kepada delapan komponen standar nasional pendidikan. Dalam penggunaan atau pembelanjaan dana BOS-BOPDA terbanyak secara berurutan untuk (a) peningkatan standar kompetensi lulusan dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler, pembiasaan keagamaan dan lomba-lomba, persiapan ujian nasional (b) peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk kegiatan pelatihan, mengikut sertakan seminar, workshop; honorarium guru tidak tetap (c) pengadaan sarana prasarana pembelajaran seperti komputer, alat-alat praktek, alat-alat olah raga; (d) Perawatan gedung dan servis alat perkantoran ; (e) peningkatan standar penilaian seperti pembiayaan Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, pengadaan lembar kerja siswa. Sedangkan standar pembiayaan, standar proses dan standar pengelolaan atau penguatan kelembagaan relatif kecil atau malah tidak didanai dengan BOS-BOPDA.

Berdasarkan analisis keefektifan biaya, SMP Khadijah Surabaya memiliki tingkat efektifitas dalam menggunakan dana BOS-BOPDA untuk peningkatan mutu yang mengacu kepada delapan komponen standar nasional. Efektifitas di sini sangat berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelola, artinya makin transparan dan akuntabilitas pengelola maka makin efektif dalam pencapaian peningkatan mutu sekolah.

3. Kepada Pemerintah :
 - a. Terus menerus memberi bimbingan yang lebih intensif kepada sekolah tentang pengelolaan BOS-BOPDA
 - b. Melakukan penataan ulang tentang tata hubungan Pemerintah, Yayasan dan Kepala sekolah khususnya yang berkaitan dengan BOS-BOPDA
 - c. Memberi jaminan kelangsungan BOS-BOPDA dan meningkatkan jumlahnya mengingat kenaikan harga barang-barang dan jasa, serta membuat program-program baru yang sejenis seperti hibah khususnya siswa miskin, asuransi kesehatan khusus siswa.
4. Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Untuk lebih berinisiatif memahami tentang pengelolaan BOS-BOPDA
 - b. Meningkatkan partisipasinya dalam pengelolaan BOS-BOPDA terutama memberi masukan atau usulan kepada Pengelola khususnya yang menyangkut kebutuhan proses pembelajaran, sarana prasarana pembelajaran sehingga pengadaan kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi efektif.
5. Kepada Orang Tua :
 - a. meningkatkan partisipasinya dengan memberi masukan tentang kebutuhan pendidikan anaknya
 - b. bersedia ikut serta dalam Tim Pengelola BOS-BOPDA, tidak hanya sekedar memenuhi formalitas, tetapi aktif dalam pengelolaan BOS-BOPDA.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta 2006
- Arifin, Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press, 1996
- Admin “Sejarah Yayasan Khadijah” dalam [http://www.khadijah.or.id/Module =detail &hal=halaman&id=2](http://www.khadijah.or.id/Module=detail&hal=halaman&id=2) (06 Juli 2011)
- Buku Profil SMP Khadijah Surabaya Tahun Pelajaran 2011/2012
Departemen Pendidikan Nasional, 2007
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2008
- Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menenga, *Era Mutu SMP* Kementrian Pendidikan Nasional 2010
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Panduan Bantuan Operasional Sekolah*, Jakarta 2012
- Engkoswara dan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Bandung : Alfabeta 2010
- Guza SS, Afnil, *Undang-undang Sisdiknas*, Asa Mandiri 2008
- Gaffar, M.F. *Visi Suatu Inovasi dalam Proses Manajemen Startegik Perguruan Tinggi*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar, Bandung :IKIP Bandung 1994
- Hasan ,Nur, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk abad 21 Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Mutu Pendidikan*
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000

<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/tgl01/04/2010>

Kementrian Pendidikan Nasional (2013)

Moleong ,Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008

Maisyaroh, *Manajemen Pendidikan Analisis Subtantif dan Aplikasinya dalam Intitusi Pendidikan* ,Malang: Universitas Negeri Malang, 2003

Marno dan Triyo Supriyanto, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam* Bandung : PT. Refika Aditna,2008

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996

Mulyasa,E ,*Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi* Bandung: Rosydakarya, 2004

Minarti , Sri, *Manajemen Sekolah* AR Ruzz Media Jogjakarta 2012

Nazir,Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Nasution, *Penelitian Naturalistik*, Bandung: Rineka Cipta, 1996

Pidarta, Made, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem.* Jakarta Rineka Cipta, 2005

Sallis, Edwad, *Total Quality Management in Education*, Yogjakarta Ircisod 2006

Sagala, Saiful, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu , Pendidikan*, Bandung: Alfabeta 2009

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Sulistiyorini, M.Pd, *Manajemen Pendidikan Islam*, Teras, Yogyakarta, 2009

- Suryadi.Ace, dan Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar Bandung* : Remaja Rosdakarya 1994
- Sumarsono, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, (2009), Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sagala, Saiful, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta2009
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta 2009
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 1* , Bandung : Imperial Bakti Utama2007
- Tim Khadijah. *50 Tahun Yayasan Khadijah Surabaya*.Surabaya: YTPS NU. 2004
- UUUD 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI
- Usman, Husaini dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Van Horne ,James C. dan John M. Wachowicz, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Penerj. Heru Sutojo. Jakarta: Salemba Empat, 1997
- Zain,Wary. *Kekhadijahan: Sejarah Yayasan Khadijah Surabaya*. (Surabaya: YTPS NU. T.T)
- Zazin Nur, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011